



Analisis Penyebab Keterlambatan Program Padat Karya Tunai Desa Di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus : Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam

Arifal Hidayat^{a,*}, Harriad Akbar Syarif^b, Yuli Afrina^c

^{a,b}Prodi Teknik Sipil Universitas Pasir Pengaraian, Roka Hulu-Riau Indonesia
 MIPA Kimia SMK Negeri 5 Pekanbaru

INFO ARTIKEL

Tersedia Online 21 Juli 2022

ABSTRAK

Tahun 2020 Desa Pauh menerima alokasi dana desa sebesar Rp. 777.922.000. Dari dana desa yang diterima hanya 76% digunakan untuk melaksanakan program padat karya tunai desa (PKTD), dan 24% program PKTD mengalami keterlambatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dari pemerintah desa terhadap faktor-faktor penyebab keterlambatan kegiatan PKTD di Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam dimasa pandemi COVID-19. Metode penelitian yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dan wawancara kepada pihak perangkat desa, BPD, dan kepala dusun I, II, III dan IV. Data kuesioner dihitung menggunakan indeks kepentingan dan uji statistik menggunakan rumus korelasi produk momen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab keterlambatan program padat karya tunai desa (PKTD) dimasa pandemi COVID-19 di Desa Pauh tahun 2020 adalah : (1) sistem organisasi, koordinasi dan komunikasi di internal desa dengan indeks = 3,13; (2) perencanaan dan penjadwalan pekerjaan dengan indeks = 3,00; (3) lingkup dan dokumen pekerjaan (kontrak) dengan indeks = 2,73; (4) aspek lain-lain (aspek diluar kemampuan pemerintah desa) dengan indeks = 2,67; (5) sistem inspeksi, control dan evaluasi dengan indeks = 2,60; (6) penyiapan sumberdaya (pekerjaan) dengan indeks = 2,27. Hasil uji validitas dan reliabilitas data kuesioner menunjukkan nilai validitas dan reliabilitas yang baik dan realibel.

Kata kunci: penyebab keterlambatan; progam PKTD; desa pauh

CONTACT

arifal.upp@upp.ac.id^{a,*}
 harriadakbarsyarif@upp.ac.id^b
 yuliafrina79@gmail.com^c

ABSTRACT

In 2020 Pauh Village received a village fund allocation of Rp. 946,732,000. Of the village funds received, only 72% were used to implement the village cash-intensive program (PKTD), and 28% of the PKTD program was delayed. This study aims to determine the perception of the village government on the factors causing the delay in PKTD activities in Pauh Village, Bonai Darussalam District during the COVID-19 pandemic. The research method was carried out by distributing questionnaires and interviews to the village officials, BPD, and heads of hamlets I, II, III and IV. The questionnaire data is calculated using the importance index and statistical tests using the moment product correlation formula. The results of the study concluded that the factors causing the delay in the village cash-intensive program (PKTD) District during the COVID-19 pandemic in Pauh Village in 2020 were: (1) organizational, coordination and communication systems within the village with an index = 3.13; (2) planning and scheduling work with index = 3.00; (3) scope and documents of work (contracts) with index = 2.73; (4) miscellaneous aspects (aspects beyond the ability of the village government) with an index = 2.67; (5) inspection, control and evaluation system with index = 2.60; (6) resource (job) setup with index = 2.27. The results of the validity and reliability test of the questionnaire data showed good and reliable validity and reliability values.

Keywords: causes of delay; PKTD program; pauh village

I. PENDAHULUAN

Dana desa yang dialokasikan Kemendes PDTT tahun 2020 sebesar Rp. 72 triliun, diperuntukkan bagi 74.953 desa. Menurut Permendes nomor 14 tahun 2020 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19, bantuan langsung tunai, serta padat karya tunai desa (PKTD) untuk pelaksanaan kegiatan infrastruktur [3].

Pemerintah Desa Pauh tahun 2020 menerima dana desa sebesar Rp. 777.920.000 rupiah, dengan rincian penggunaan dana desa sebagai berikut : Rp. 38.896.000 juta untuk tanggap COVID-19, untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp. 544.544.000, dan BLT dana desa sebesar Rp. 116.688.000 rupiah. Menurut laporan realisasi keuangan desa, dana desa yang terserap untuk kegiatan program PKTD sebesar 76%, dan 24% mengalami keterlambatan [9].

Kegiatan pembangunan infrastruktur di desa sering kali timbul permasalahan yang dapat mengakibatkan waktu penyelesaian infrastruktur tidak sesuai dengan rencana sehingga mengalami keterlambatan. Dalam manajemen proyek, bidang-bidang yang rawan sehingga menyebabkan keterlambatan penyelesaian proyek konstruksi, yaitu: a) perencanaan dan penjadwalan pekerjaan; b) lingkup dokumen pekerjaan (kontrak); c) sistem organisasi, koordinasi dan komunikasi; d) penyiapan sumberdaya; e) sistem inspeksi, kontrol dan evaluasi pekerjaan; f) aspek lain-lain (aspek diluar kemampuan pemilik dan pemborong) [11].

Hidayat A, Hadi N (2022), dalam penelitiannya menyatakan bahwa faktor utama penyebab keterlambatan kegiatan infrastruktur di Desa Bangun Purba Barat Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah desa dalam penyiapan sumber daya dari aspek pra-konstruksi sampai proses kegiatan pembangunan di lapangan [7].

Lubis R (2020), dalam penelitiannya terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terkendalanya pembangunan infrastruktur menurut pemerintah desa disebabkan karena aspek perencanaan dan jadwal kegiatan yang lambat dan kurang terencana dengan baik [10].

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015

tentang Dana Desa, dalam Pasal 27 dinyatakan dengan tegas sanksi administratif dan sanksi berupa pemotongan dana desa tahun anggaran berikutnya sebesar SILPA dana desa tahun berjalan [6].

Sejauh ini faktor utama penyebab keterlambatan pada kegiatan PKTD di Desa Pauh belum teridentifikasi dengan sistematis, sehingga perlu dilakukan penelitian analisis penyebab keterlambatan program PKTD dimasa pandemi COVID-19 di Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam menurut persepsi pihak pemerintah desa.

1.1 Program PKTD

Padat Karya Tunai merupakan program pemerintah berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan *marginal*, bersifat produktif yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk menambah pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat [5].

1.2 Manfaat Program PKTD

Permendes Nomor 19 Tahun 2017 menyatakan bahwa manfaat program PKTD adalah :

1. Ditujukan bagi masyarakat kurang mampu.
2. Menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama.
3. Merupakan kesempatan kerja sementara.
4. Mekanisme penentuan dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah desa.
5. Berdasarkan rencana kerja yang disusun sesuai dengan kebutuhan lokal.
6. Difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perdesaan/pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.
7. Mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur dan penurunan kemiskinan di desa.
8. Meningkatkan produktifitas, pendapatan dan daya beli masyarakat desa [4].

1.3 Dampak Program PKTD

Menurut Permendes Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, bahwa diharapkan PKTD

memberi dampak sebagai berikut :

1. Tersedianya lapangan kerja dan usaha bagi penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin.
2. Tumbuhnya rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat.
3. Terkelolanya potensi sumberdaya lokal secara optimal.
4. Turunnya jumlah balita kurang gizi di desa.
5. Terjangkaunya masyarakat desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi.
6. Turunnya arus migrasi dan urbanisasi [4].

1.4 Penyebab Keterlambatan

Dalam manajemen proyek, beberapa aspek yang dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan penyelesaian proyek konstruksi antara lain:

1. Perencanaan dan penjadwalan pekerjaan
2. Lingkup dokumen pekerjaan (kontrak)
3. Sistem organisasi, koordinasi dan komunikasi
4. Penyiapan sumberdaya
5. Sistem inspeksi, kontrol dan evaluasi pekerjaan
6. Aspek lain-lain (aspek diluar kemampuan pemilik dan pemborong [11].

Hidayat dan Afrina (2020), dalam penelitiannya menyatakan bahwa faktor penyebab keterlambatan pembangunan infrastruktur di Desa Bangun Purba Timur Jaya Kabupetan Rokan Hulu adalah: (a) perencanaan dan penjadwalan kegiatan kurang baik; (b) dokumen kegiatan kurang tertib; (c) sistem organisasi kegiatan buruk; (d) penyiapan sumber daya kegiatan terbatas; (e) control dan evaluasi kegiatan yang kurang baik; (f) sistem penyusunan rencana yang kurang matang; (g) lain-lain (diluar kemampuan TPK) [8].

1.5 Peran Pemerintah Desa

Dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, Bab I Pasal 2 ayat 1-2 dijelaskan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong [2].

1.6 Peran Masyarakat

Keterlibatan masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan desa, sesuai ketentuan Pasal 80, 81,82 Undang-Undang Desa. Dalam kegiatan pembangunan desa,seluruh komponen masyarakat diberi hak yang sama dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan sehingga dapat dirasakan semua pihak [1].

1.7 Indeks Kepentingan

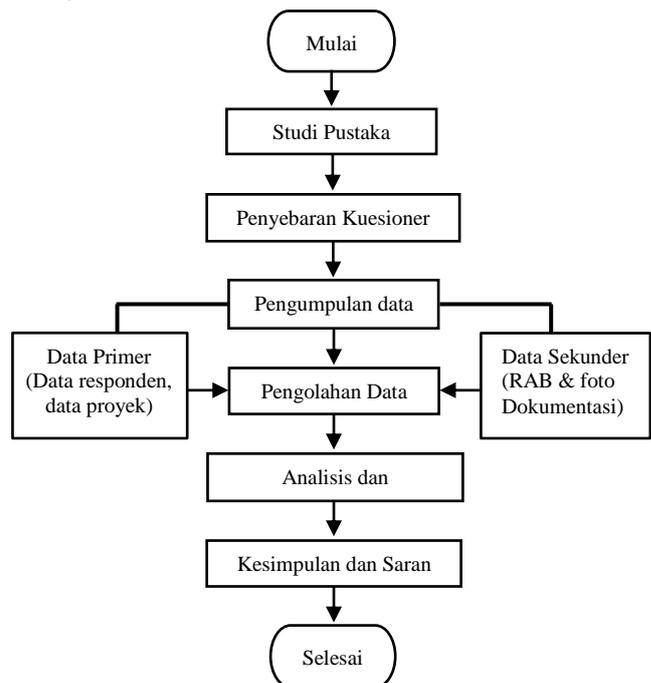
Teknik analisis ini berfungsi untuk menentukan peringkat (*ranking*) dari faktor-faktor yang mempengaruhi sesuatu hal yang berhubungan dengan masalah matematis yang sering terjadi di masyarakat dan kelompok. Yang akan dijadikan variabel pengamatanya yaitu tingkat pelayanan, biaya, frekwensi, dan waktu. Rumus indeks kepentingan [12]”.

Untuk penilaian hasil indeks kepentingan dengan cara mengurutkan setiap ranking dari tiap masalah yang ditinjau, sehingga dapat diketahui masalah/faktor utamanya. Selanjutnya dari hasil perhitungan terhadap indeks kepentingan tadi dapat diketahui peringkatnya dari masing-masing penilaian.

II. MATERIAL DAN METODE

2.1 Tahapan Penelitian

Secara garis besar tahapan penelitian adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Tahapan penelitian

2.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah kegiatan infrastruktur desa tahun 2022 berlokasi di Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam.

2.3 Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah pihak pemerintah desa mulai dari perangkat desa, badan permusyawaratan desa (BPD), serta pihak kepala dusun yang merupakan pihak yang turut serta secara langsung dan terlibat dalam pembangunan infrastruktur didesa, sehingga diharapkan jawabannya lebih aktual.

2.4 Sampel Penelitian

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 responden, yang terdiri dari perangkat desa (*owner*) = 6 responden, BPD (pengawas proyek) = 5 responden, dan kadus (pelaksana) = 4 responden yang mewakili tiga unsur dalam proyek konstruksi.

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan data dilakukan dengan cara :

1. Wawancara, yaitu mencari informasi kepada responden terkait masalah penyebab keterlambatan PKTD pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa.
2. Kuesioner, yaitu mengajukan pertanyaan tertulis berkaitan penyebab keterlambatan PKTD pada kegiatan infrastruktur desa kepada responden. Hasil kuesioner lalu direkap dan dianalisis secara sistematis sampai didapat suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

2.6 Rancangan Kuesioner

Kuesioner dirancang dalam tiga kelompok yaitu :

1. Data responden dan proyek (jabatan, pendidikan dan pengalaman responden, besaran anggaran pembangunan infrastruktur desa, apakah pernah kegiatan infrastruktur mengalami keterlambatan dan persentase rata-rata keterlambatan yang terjadi).
2. Persepsi responden terhadap faktor-faktor penyebab keterlambatan kegiatan PKTD di Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam dimasa pandemi COVID-19.

2.7 Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data kuesioner terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan rumus *mean rank* (indeks kepentingan), yang merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan pada nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata digunakan untuk menentukan faktor-faktor yang sangat berpengaruh sebagai faktor penyebab keterlambatan pembangunan infrastruktur desa.

Nilai *mean* ini didapat dengan cara menjumlahkan data seluruh responden dalam kelompok yang telah mengisi kuesioner, kemudian dibagi dengan jumlah

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang dianalisis merupakan hasil penelitian yang dikumpulkan dari 15 responden yang merupakan sampel penelitian, yang disebarkan menggunakan kuesioner kepada pihak pemerintah Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam.

3.1 Analisis Terhadap Profil Responden

Tabel 1. Profil responden

Kategori	Persentase (%)
Jabatan responden	
a) Kades dan perangkat desa	40
b) BPD	33
c) Kadus I, II, III	27
Pendidikan responden	
a) SMA/SMK	27
b) D3	40
c) S1	33
Pengalaman responden	
a) 1 – 5 tahun	0
b) 5 – 10 tahun	29
c) > 10 tahun	71

responden yang ada pada kelompok tersebut. Skala pengukuran yang dipakai memakai skala Likert [12]. Rumus indeks kepentingan (*mean rank*) adalah :

$$\text{Mean} = I = \sum_{i=1}^4 \frac{f_i X_i}{N} \quad (1)$$

keterangan:

I = indeks kepentingan

N = jumlah responden

X_i = frekuensi jawaban dari setiap persepsi (1,2,3,4)

X_1 = frekuensi jawaban tidak berpengaruh (TB)

X_2 = frekuensi jawaban agak berpengaruh (AB)

X_3 = frekuensi jawaban berpengaruh (B)

X_4 = frekuensi jawaban sangat berpengaruh (SB)
 a_i = nilai atas persepsi/opini yang diberikan (1,2,3,4).

Selanjutnya data kuesioner harus dilakukan tahapan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan teknik korelasi *product moment* dengan taraf signifikan 5% melalui beberapa tahap proses uji terhadap sampel penelitian. Penilaian hasil uji reliabilitas dengan melihat angka reliabilitas yang dihasilkan dengan melihat nilai interpretasi sesuai dengan tabel berikut [12].

Tabel 2. Nilai koefisien korelasi R

Nilai r	Interpretasi
0	Tidak ada korelasi
0,01 – 0,20	Sangat rendah
0,21 – 0,40	Rendah
0,41 – 0,60	Agak rendah
0,61 – 0,80	Cukup
0,81 – 0,99	Tinggi
1	Sangat tinggi

3.2 Analisis Terhadap Profil Proyek

Tabel 3. Profil proyek

Kategori	Persentase (%)
Nilai pagu rata-rata proyek	
a) 10 jt – 50 jt	6
b) 51 jt – 100 jt	67
c) > 100 jt	27
Persentase proyek mengalami keterlambatan	
a) Pernah	53
b) Tidak pernah	40
c) Selalu	7
Persentase rata-rata keterlambatan	
a) < 5%	40
b) 5 – 10%	60

3.3 Analisis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Program PKTD Dimasa Pandemi COVID-19

Hasil rangkuman persepsi responden terhadap faktor-faktor penyebab keterlambatan program PKTD dimasa pandemi COVID-19 kegiatan infrastruktur di Desa Pauh dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4. Penyebab keterlambatan program PKTD

No	Faktor Penyebab Keterlambatan	Jawaban Responden				
		TB	AB	B	SB	Jml
A	Perencanaan dan penjadwalan pekerjaan	1	3	6	5	15
B	Lingkup dan dokumen	1	4	6	4	15

pekerjaan (kontrak)						
C	Sistem organisasi, koordinasi dan komunikasi	1	2	6	6	15
D	Penyiapan sumber daya	5	4	4	2	15
E	Sistem inspeksi, control dan evaluasi pekerjaan	3	3	5	4	15
F	Aspek lain-lain (aspek diluar kemampuan pemilik dan kontraktor)	2	4	5	4	15

3.4 Analisis Indeks Kepentingan

Hasil indeks kepentingan terhadap faktor-faktor penyebab keterlambatan program PKTD dimasa pandemic COVID-19 dijawab oleh 15 responden, hasilnya sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil analisis indeks kepentingan

Faktor Penyebab Keterlambatan Program PKTD	Mean	Ranking
Sistem organisasi, koordinasi dan komunikasi	3,13	1
Perencanaan dan penjadwalan pekerjaan	3,00	2
Lingkup dan dokumen pekerjaan (kontrak)	2,73	3
Aspek lain-lain (aspek diluar kemampuan pemerintah desa)	2,67	4
Sistem inspeksi, control dan evaluasi pekerjaan	2,60	5
Penyiapan sumberdaya (pekerjaan)	2,27	6

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui faktor-faktor penyebab keterlambatan program PKTD dimasa pandemi COVID-19 di Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam adalah sebagai berikut :

1. Sistem organisasi, koordinasi dan komunikasi
2. Perencanaan dan penjadwalan pekerjaan
3. Lingkup dan dokumen pekerjaan (kontrak)
4. Aspek lain-lain (aspek diluar kemampuan pemerintah desa)
5. Sistem inspeksi, control dan evaluasi pekerjaan
6. Penyiapan sumber daya.

Pada Tabel 5 terlihat bahwa faktor sistem organisasi, koordinasi dan komunikasi menjadi faktor yang paling banyak dipilih responden sebagai penyebab keterlambatan pertama dengan nilai *mean* = 3,13. Selanjutnya faktor perencanaan dan penjadwalan pekerjaan menjadi faktor kedua dipilih responden dengan nilai *mean* = 3,00. Faktor lingkup dan dokumen pekerjaan (kontrak) menjadi

faktor ketiga dipilih dengan nilai $mean = 2,73$.

Faktor aspek lain-lain (aspek diluar kemampuan pemerintah desa) pekerjaan menjadi faktor keempat dengan nilai $mean = 2,67$. Selanjutnya faktor sistem inspeksi, control dan evaluasi pekerjaan menjadi faktor kelima dengan nilai $mean = 2,60$. Faktor penyiapan sumberdaya (pekerja) menjadi faktor keenam dipilih responden sebagai penyebab keterlambatan program PKTD dengan nilai $mean = 2,27$.

3.5 Analisis Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian mampu mengukur apa yang ingin diukur dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat [12]. Hasil uji validitas data kuesioner terhadap faktor penyebab keterlambatan program PKTD dimasa pandemi COVID-19 pada kegiatan infrastruktur di Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Hasil korelasi (r_{hitung}) validitas

No	Faktor Penyebab Keterlambatan	r_{hitung}
A	Perencanaan dan penjadwalan pekerjaan	0,741
B	Lingkup dan dokumen pekerjaan (kontrak)	0,763
C	Sistem organisasi, koordinasi dan komunikasi	0,750
D	Penyiapan sumber daya	0,718
E	Sistem inspeksi, control dan evaluasi pekerjaan	0,758
F	Aspek lain-lain (aspek diluar kemampuan pemilik dan kontraktor)	0,769

Uji validitas dilakukan pada 15 responden, dimana nilai r_{tabel} (korelasi *product moment*) dengan taraf signifikan 5% sebesar 0,592. Hasil uji validitas instrumen didapat bahwa semua instrumen penelitian terhadap aspek desain dan dokumentasi dinyatakan valid, karena semua koefisien korelasi lebih besar dari r_{tabel} yaitu $< 0,592$.

3.6 Analisis Reliabilitas

Reliabilitas merujuk kepada konsistensi hasil perekaman data (pengukuran) kalau instrumen itu digunakan oleh kelompok orang atau orang yang sama dalam waktu berlainan atau kalau instrumen digunakan oleh orang yang berbeda dalam waktu yang sama atau waktu yang berlainan. Jika hasilnya konsisten, maka instrumen dapat

dipercaya (*reliable*) atau dapat di andalkan (*dependen*) [12].

Uji reliabilitas dilakukan pada 15 responden yang sama dengan responden uji validitas yaitu pemerintah Desa Bangun Purba Barat (aparatus desa, BPD dan kadus-kadus). Dari hasil analisis uji reliabilitas instrumen penelitian diperoleh nilai produk momen atau nilai $r = 0,892$, jika dilihat dari Tabel 1 (Nilai koefisien korelasi R) pengukuran terhadap faktor-faktor penyebab keterlambatan pembangunan infrastruktur memiliki nilai interpretasi yang cukup. Artinya variabel instrumen penelitian dapat dikatakan *reliable*. Nilai interpretasi ini menunjukkan bahwa jawaban yang diberikan pemerintah Desa Pauh (aparatus desa, BPD dan kadus-kadus) memiliki tingkat konsistensi yang baik.

IV. KESIMPULAN

1. Bahwa faktor-faktor penyebab keterlambatan kegiatan infrastruktur program PKTD dimasa pandemic COVID-19 di Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam adalah : (1) sistem organisasi, koordinasi dan komunikasi di internal desa dengan indeks = 3,13; (2) perencanaan dan penjadwalan pekerjaan dengan indeks = 3,00; (3) lingkup dan dokumen pekerjaan (kontrak) dengan indeks = 2,73; (4) aspek lain-lain (aspek diluar kemampuan pemerintah desa) dengan indeks = 2,67; (5) sistem inspeksi, control dan evaluasi dengan indeks = 2,60; (6) penyiapan sumberdaya (pekerjaan) dengan indeks = 2,27.
2. Hasil analisis validitas data kuesioner didapat bahwa seluruh pertanyaan item semua item 1 sampai 6 memiliki nilai validitas yang baik yaitu di atas nilai $r_{tabel} = 0,592$, sedangkan hasil analisis reliabilitas menghasilkan nilai $R_{reliabilitas} = 0,892$ yang berarti bahwa pengukuran yang dilakukan memiliki nilai interpretasi yang tinggi atau jawaban yang diberikan oleh responden memiliki tingkat konsistensi yang baik atau *realibel*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan artikel jurnal ini:

1. Rektor UPP, Dekan Fakultas Teknik UPP, atas arahan dan bimbingan yang diberikan selama proses penelitian;
2. Pemerintah Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam atas kontribusinya mengisi data kuesioner;
3. Semua pihak yang turut membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu namanya.

[11] Widiyanti., Lenggogeni. "Manajemen Konstruksi". *PT. Remaja Rosdakarya*. Jakarta, 2013.

[12] Sugiyono. "Statistika untuk Penelitian", *Alfa Beta*. Bandung, 2012.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anonim. "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa+".
- [2] Anonim. "Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa".
- [3] Anonim. "Permendes PDTT Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa".
- [4] Anonim. "Permendes PDTT Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018".
- [5] Anonim. "SKB 4 Menteri Tentang Pedoman Petunjuk Pelaksanaan Padat Karya Tunai. 2018".
- [6] Anonim. "Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Dana Desa yang Bersumber dari Dana APBN".
- [7] Hidayat. A dan Hadi. N. "Analisis Manajemen Proyek Terhadap Faktor Penyebab Keterlambatan Pembangunan Infrastruktur Desa Bangun Purba Barat". 2022
- [8] Hidayat. A dan Afrina. Y. "Klasifikasi dan Peringkat dari Faktor Penyebab Keterlambatan Pada Kegiatan Infrastruktur Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba". 2020.
- [9] Pemerintah Desa Pauh. "Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2020".
- [10] Rajab Lubis. "Efektivitas Program Padat Karya Tunai Desa Pada Pembangunan Infrastruktur Di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah"., 2019